

TAJUK

Sibuk Nyaleg,
Anggota Dewan Bolos

SEJAK satu bulan belakangan, kantor legislatif lengang dari anggota dewan yang terhormat. Kondisi itu terjadi pada semua level, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten. Mayoritas anggota dewan bolos kerja. Masing-masing sibuk dengan program sosialisasi berupa kampanye formal dan non formal ke masyarakat. Nyaris seluruh anggota legislative kembali ikut mencalonkan diri di Pemilu 2014.

Anggota DPR dan DPD RI sibuk turun ke daerah pemilihan mereka masing-masing. Keberadaan mereka di Jakarta, bisa jadi hanya 20 persen saja dalam satu bulan. Selain sibuk sosialisasi di dapil masing-masing, ada lagi anggota DPR dan DPD RI yang memiliki kesibukan tambahan, yakni ikut konvensi calon presiden RI yang dilaksanakan salah satu parpol. Kegiatan konvensi dilaksanakan secara marathon dari satu provinsi ke provinsi lainnya.

Hal itu tak terkecuali bagi mayoritas anggota DPR DPD RI dapil Sumbar. Waktu mereka sejak satu-dua bulan belakangan lebih banyak disita oleh kegiatan sosialisasi pencalegan mereka, ketimbang melaksanakan tugas sebagai anggota DPR RI di Gedung DPR/DPD/MPR Senayan Jakarta. Dengan demikian, tentu saja rapat-rapat di Senayan menjadi sepi.

Begitu juga dengan anggota DPRD Provinsi Sumbar. Sebagian besar sibuk dengan agenda sosialisasi pencalegan di dapil masing-masing. Ruang komisi/fraksi dan pimpinan sering kosong melompong. Padahal itu tak boleh terjadi. Salah seorang pimpinan dewan mesti ada di kantor. Itu sangat penting. Apalagi ketika tiba-tiba saja ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke gedung dewan, namun ketika itu tak seorang pun unsur pimpinan dan anggota dewan yang berada di tempat. Kasus ini telah beberapa kali terjadi di Kantor DPRD Sumbar.

Sebagaimana juga pengakuan dari Ketua Komisi III DPRD Sumbar H M Nurnas ST, dalam jadwal yang dirilis oleh Sekretariat Dewan DPRD Sumbar, 17 Maret sampai dengan 12 April 2014, anggota DPRD Sumbar telah mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini SKPD Pemprov Sumbar. Namun, menurut pantauan *Haluan*, Rabu (26/3), tidak satu komisi pun dari empat komisi yang ada, melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerjanya.

Permasalahannya, karena kehadiran anggota dewan sangat minim, bisa dihitung dengan jari saja. Anggota

Kapolda Baru, Ragam Tantangan

IWAN SULISTYO

Dosen FISIPol Universitas Ekasakti, Padang;
Alumnus Kriminologi FISIP-UI;

TAJUK *Haluan* (19/3), "Selamat Bertugas Brigjen Bambang", penting dan menarik untuk

dicermati. Di situ disinggung sejumlah tantangan yang akan dihadapi Kapolda Sumbar yang baru, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto (kelahiran 1962; lulusan Akpol 1984; kaya pengalaman di bidang reserse; sebelumnya menjabat Karosunluhkum, Divkum Polri).

Beberapa tantangan utama itu, antara lain, penertiban tambang liar di sejumlah kabupaten (Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya) serta kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Juga soal bagaimana menekan angka kriminalitas dan, tentu saja, penyelenggaraan pemilihan umum – baik legislatif dan presiden 2014 maupun pemilihan kepala daerah – dalam beberapa waktu mendatang.

Brigjen Bambang menegaskan tiga target pokok: (1) "Tidak ada darah menetes" (artinya tak ada perkelahian massa dan pembunuhan); (2) "Tidak ada kaca yang pecah" (tak ada perkelahian dan anarkis); serta (3) "Tidak ada

moral, dan kesantunan berpolitik. Di samping memperkuat konsolidasi internal tiap partai politik, para elit lokal juga harus mampu mengendalikan pendukungnya; terutama di tingkat akar rumput. Dengan harapan, tidak ada gesekan kecil yang dapat memicu benturan dan letupan besar. Kita semua berharap, kelak, jika terjadi "selisih perolehan suara yang tipis" ataupun kekecewaan terhadap 'wasit', itu tidak secara signifikan memengaruhi stabilitas keamanan.

Setiap perwira tinggi kepolisian yang ditunjuk menjadi pimpinan puncak pada tingkat provinsi di Indonesia adalah mereka yang telah berpengalaman, pun dibekali wawasan kepemimpinan dan manajerial. Karena itu, mereka akan selalu memiliki tantangan yang variatif dan kontekstual. Ragam tantangan itu sifatnya cair; ia menyatu dengan dimensi kehidupan yang luas dan dinamis. Tinggal bagaimana memastikan bahwa panel-panel, sistem, dan komponen yang bergerak di bawah komando mereka bekerja dengan baik.

pembangunan kemitraan strategis antara polisi dan masyarakat. Ia juga dapat sebagai laboratorium masalah-masalah sosial-kemasyarakatan.

Dua simpul

Bila mengamati kinerja institusi kepolisian secara umum, 'dimensi kunci' yang layak diungkap adalah *trust* (kepercayaan). Kepercayaan yang tinggi amat tergantung pada citra positif yang dibangun. Dari sini kita bisa mengurainya ke dalam dua simpul penting.

Pertama, ihwal tugas utama kepolisian: "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri." (UU No. 2/2002 tentang Polri).

Ketersediaan infrastruktur ruang publik yang semakin baik, tidak menyurutnya jumlah penduduk miskin, dan kian bertambahnya jumlah kelas-menengah – pada saat yang sama – niscaya menyimpan persoalan besar. Sebagai provinsi yang berada di tengah Pulau Sumatera, Sumbar juga sangat rawan akan kejahatan lintas-provinsi dan bahkan lintas-negara.

Sungguhpun kejahatan, sebagaimana yang dikatakan sosiolog terkemuka dunia – Emil Durkheim, dipan-

dasar kajian yang komprehensif, polisi yang cerdas akan selalu memiliki strategi untuk membunuh pola tindak kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, sejak dari embrio. Sementara, untuk kejahatan kerah putih (*White-Collar Crime*; melibatkan kelas atas), tentu butuh penanganan dan keberanian tersendiri.

Selain itu, dinamika penegakan hukum dalam spektrum ekonomi-politik (sejumlah titik yang menyimpan kekayaan alam/mineral) pun membutuhkan kehati-hatian. Dialog yang intensif dan saling memahami perbedaan cara pandang antarpihak untuk mencapai kata mufakat penting dilakukan.

Bila kepolisian berkomitmen terhadap upaya untuk semakin melindungi, melayani, dan mengayomi dalam 'menggunakan' serta 'menegakkan hukum'; wujud itu niscaya akan terlihat dari kian baiknya citra. Itu akan terbaca dari cepat-tanggap dan responsifnya mereka terhadap aduan masyarakat.

Kedua, soal *community policing* (sebagian pakar di Indonesia menerjemahkannya sebagai 'pemolisian komuniti'; sebagian lainnya 'perpolisian masyarakat', Polmas). Terlepas dari perdebatan akademik soal penggunaan istilah serta bagaimana mengukur keberhasilan dalam konsep

akan menjadi lebih ringan. Tinggal bagaimana memperkuat koordinasi dengan jajaran pada tingkat kabupaten/kota. Betapapun jitu program yang ada, ia harus terlaksana dengan mantap oleh jajaran di lapangan.

Penting pula untuk mendorong jajaran kepolisian di daerah agar memperkuat Polmas. Hal yang tidak dapat diabaikan ialah memperbanyak varian program dengan menjangkau lintas-usia dan lintas-kelompok. Mengintensifkan kemitraan dengan masyarakat, misalnya sosialisasi lewat jejaring sosial (24 jam sehari; utamanya menjangkau kelas-menengah yang rentan menjadi korban kejahatan), niscaya akan lebih efisien.

Di samping "pemuhan aneka kebutuhan pokok dan disiplin sosial memang adalah kunci stabilitas dari suatu daerah"; namun, kemitraan polisi-masyarakat merupakan aspek yang kritical bagi pencapaian tertib hukum dan tertib sosial; termasuk usaha menyebarluaskan kampanye sadar hukum dan tertib berlalu-lintas agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya.

Kendati Polri hanya memperoleh alokasi anggaran yang terbatas, sekitar Rp45 triliun untuk 2014 (termasuk tambahan Rp1

pimpinan dan anggota dewan yang berada di tempat. Kasus ini telah beberapa kali terjadi di Kantor DPRD Sumbar.

Sebagaimana juga pengakuan dari Ketua Komisi III DPRD Sumbar H M Nurnas ST, dalam jadwal yang dirilis oleh Sekretariat Dewan DPRD Sumbar, 17 Maret sampai dengan 12 April 2014, anggota DPRD Sumbar telah mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini SKPD Pemprov Sumbar. Namun, menurut pantauan *Haluan*, Rabu (26/3), tidak satu komisi pun dari empat komisi yang ada, melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerjanya.

Permasalahannya, karena kehadiran anggota dewan sangat minim, bisa dihitung dengan jari saja. Anggota dewan lebih memilih melakukan sosialisasi, dan menjaring suara untuk persiapan pertarungan pileg pada 9 April 2014. Pengakuan Nurnas, untuk tahun 2014 setidaknya ada 27 ranperda yang akan dibahas oleh DPRD Sumbar. 24 ranperda diantaranya merupakan ranperda yang masuk di tahun 2014, dan tiga ranperda lagi merupakan ranperda tahun 2012 lalu yang terbengkalai, dan harus dimasukkan lagi di pembahasan tahun 2014.

Dari jumlah ranperda yang masuk itu, sampai saat ini belum satu ranperda pun yang telah selesai dibahas. Padahal, beberapa di antaranya merupakan ranperda yang sangat vital, dan harus segera diselesaikan. Ranperda itu yakni, RPJMD, hukum, dan lainnya. Nurnas pesimis DPRD Padang bakal bisa menyelesaikan ranperda tersebut hingga 50 persen. Apalagi masa tugas anggota dewan akan berakhir 28 Agustus 2014 nanti.

Fakta di DPR, DPD RI dan DPRD Sumbar tentu membuat kita sangat kecewa. Di satu sisi mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif yang semestinya. Sementara di sisi lain mereka mendapat berbagai fasilitas serba wahh.. yang jelas-jelas sangat membebani Negara. Dalam sosialisasi dan kampanyenya mereka berkoar-koar dengan janji akan menjadi anggota legislatif yang profesional dan tidak korupsi. Tapi buktinya, dalam menjalankan tugas mereka sebagai anggota legislatif petahana saja mereka bermain-main dan cenderung menyepikan amanah yang diberikan oleh masyarakat di Pemilu 2009 lalu.

Anggota dewan berstatus caleg yang berperilaku demikian jelas-jelas tidak berintegritas dan tidak memiliki hati nurani. Yang ada di pikiran mereka hanyalah, bagaimana bisa mempertahankan posisi agar di Pemilu 2014 bisa terpilih kembali. Karena itu, masyarakat sebaiknya jangan lagi memilih caleg yang demikian. Dalam kondisi sekarang yang dapat mengevaluasi anggota dewan, hanyalah masyarakat. Karena pimpinan dan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar juga pada sibuk dan permasalahannya nyaris serupa dengan pimpinan dan anggota lainnya yang sibuk dengan kegiatan sosialisasi. **

umum – baik legislatif dan manajerial. Karena itu, mereka akan selalu memiliki tantangan yang variatif dan kontekstual. Ragam tantangan itu sifatnya cair; ia menyatu dengan dimensi kehidupan yang luas dan dinamis. Tinggal bagaimana memastikan bahwa panel-panel, sistem, dan komponen yang bergerak di bawah komando mereka bekerja dengan baik.

Brigjen Bambang menegaskan tiga target pokok: (1) “Tidak ada darah menetes” (artinya tak ada perkelahian massa dan pembunuhan); (2) “Tidak ada kaca yang pecah” (tak ada perkelahian dan anarkis); serta (3) “Tidak ada asap di Sumbar terkait dengan pemilu” (tak ada pembakaran dan kerusakan). [*Haluan*, 20/3]

Dari tiga frase bersayap ini, tampak bahwa ia paham terhadap tantangan besar yang sudah di depan mata, yakni Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Ia juga menyadari sepenuhnya, penyelenggaraan demokrasi prosedural di Sumbar membutuhkan perhatian dan penanganan ekstra.

Lebih jauh, sebagai polisi sipil di tengah lalu-lintas kepentingan politik antarelit, aktor, dan faksi dari tingkat provinsi hingga lokal, ia berkomitmen untuk tetap di posisi netral dan profesional. Komitmen yang lebih rinci, misalnya, juga tampak ketika Brigjen Bambang mengunjungi redaksi sejumlah harian lokal di Sumbar, Senin (24/3) lalu.

Tahun ini adalah tahun politik. Apapun bisa terjadi dan siapapun bisa berbuat *out of control*. Praktis, makna terhadap pengertian “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana; serta seberapa banyak?” sangat terasa kental dalam tahun ini.

Bagaimanapun, upaya sang Kapolda hanya akan berarti manakala gelanggang pemilu diisi dengan etika,

pimpinan dan manajerial. Karena itu, mereka akan selalu memiliki tantangan yang variatif dan kontekstual. Ragam tantangan itu sifatnya cair; ia menyatu dengan dimensi kehidupan yang luas dan dinamis. Tinggal bagaimana memastikan bahwa panel-panel, sistem, dan komponen yang bergerak di bawah komando mereka bekerja dengan baik.

Dibanding dengan, misalnya, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua (semuanya Polda tipe A; dijabat bintang dua), Sumbar relatif memang bukanlah provinsi yang terlalu besar dan strategis, apalagi secara ekonomi. Namun, bukan berarti Sumbar adalah pos yang tidak penting.

Dengan total populasi nyaris 5 juta jiwa (mayoritas adalah muslim yang relatif kuat dengan nilai-nilai adat Minangkabau, termasuk budaya *merantau*nya), jumlah penduduk miskin sekitar 380.626 jiwa (September 2013), angka pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 150,7 ribu orang (bertambah 8,5 ribu orang dari Agustus 2012; jumlah *trend* pengangguran laki-laki mengalami kenaikan dan perempuan mengalami penurunan dalam interval ini), serta pertumbuhan ekonomi pada 2011 sebesar 6,22% [semua merujuk data BPS Sumbar], dan bahkan tidak pula memiliki sumber daya alam yang melimpah; Sumbar justru menyimpan potensi untuk menjadi salah satu contoh

nya jumlah kelas-menengah – pada saat yang sama – niscaya menyimpan persoalan besar. Sebagai provinsi yang berada di tengah Pulau Sumatera, Sumbar juga sangat rawan akan kejahatan lintas-provinsi dan bahkan lintas-negara.

Sungguhpun kejahatan, sebagaimana yang dikatakan sosiolog terkemuka dunia – Emil Durkheim, dipandang sebagai gejala yang normal di dalam masyarakat; tetapi, upaya menekan *crime rate* (angka kejahatan) hingga ke titik terendah membutuhkan kerjasama multi-sektor, tidak hanya kepolisian. Lagipula, menurunnya *fear of crime* (rasa takut akan kejahatan) juga membutuhkan peran media massa yang profesional.

Menanggulangi kejahatan jalanan bertaut dengan seberapa besar peran pemerintah daerah dalam menangani angka pengangguran usia produktif. Ketersediaan pelatihan keterampilan, modal, dan birokrasi yang efektif dan efisien menjadi suatu yang tak terhindarkan. Alhasil, semua unsur pemerintah daerah harus kompak untuk menekan angka putus sekolah.

Kesempatan memperoleh kredit lunak, dari bank ataupun pemerintah, untuk modal berwirausaha bagi masyarakat harus didukung oleh karakter dan mentalitas manusia yang pekerja keras, gigih, bersemangat, kreatif, dan pantang menyerah.

Hampir semua pemikir kriminologi sadar, tiada ‘resep jitu’ atau ‘jawaban tunggal’ dalam mencegah kejahatan. Namun, atas

dan responsifnya mereka terhadap aduan masyarakat.

Kedua, soal *community policing* (sebagian pakar di Indonesia menerjemahkannya sebagai ‘pemolisian komuniti’; sebagian lainnya ‘perpolisian masyarakat’, Polmas). Terlepas dari perdebatan akademik soal penggunaan istilah serta bagaimana mengukur kegunaan atau bahkan keberhasilan dalam konsep ini, kita rujuk saja Skep Kapolri No. 737/2005 (disempurnakan dengan Peraturan Kapolri No. 7/2008) yang intinya Polmas mengandung tujuan agar rakyat dan aparat kepolisian bersinergi guna menyelesaikan pelbagai persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan.

Sejauh pengamatan saya, upaya membangun Polmas di Sumbar dilakukan dengan cukup serius dan intensif. Salah satunya oleh jajaran kepolisian di Kabupaten Dharmasraya. Sang Kapolres paham konsep dan juga cekatan dalam menerapkannya di lapangan. Walau masih terdapat kekurangan, tentu upaya itu layak diapresiasi.

Daya dukung yang ber-sumber dari kearifan lokal Minangkabau memungkinkannya implementasi program Polmas berjalan dengan baik. Sebab, di ranah Minang terdapat apa yang disebut sebagai *tungku tigo sajarangan*; suatu keterpaduan erat antara tiga unsur penting dalam masyarakat (*niniak mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai*).

Terlepas dari pergeseran makna filosofis adat itu dalam kondisi kekinian, beban Brigjen Bambang

kritikal bagi pencapaian tertib hukum dan tertib sosial; termasuk usaha menyebarluaskan kampanye sadar hukum dan tertib berlalu-lintas agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya.

Kendati Polri hanya memperoleh alokasi anggaran yang terbatas, sekitar Rp45 triliun untuk 2014 (termasuk tambahan Rp1 triliun bagi penyelenggaraan Pemilu); akan tetapi, menghadirkan ‘rasa aman dan tenang’ di tengah rakyat adalah bagian penting dari pilar penopang kesejahteraan dalam arti yang sangat luas. ***

Kesemua ragam tantangan di atas, dengan demikian, mensyaratkan kerjasama yang terpadu dan sepe-nuh hati dari semua lapisan masyarakat; khususnya dalam memberantas kejahatan kekerasan yang akhir-akhir ini – sejauh pengamatan saya – cukup intens dan meresahkan.

Keamanan di Sumbar, sebagaimana provinsi-provinsi lainnya, harus ditangani secara lintas sektor dan lintas disiplin; utamanya secara kriminologis, sosiologis, antropologis, dan demografis.

Ketika hendak menutup tulisan ini, sembari menikmati secangkir kopi; entah mengapa, tiba-tiba saya teringat kata-kata Albert Einstein, seorang ilmuwan besar dunia: “*The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it.*” Selamat mengabdikan di Ranah Minang, Jenderal. ***

HALUANISME

■ Survei: Demokrat Tak Disukai

● Tangan mencincang, bahu

Menjual Harga Diri

KETIKA memasuki masa pemilihan umum (pemilu),

pai ke *lapau-lapau* (warung-red), dan pertemuan yang paling sering itu tetap di

Ternyata, sebagian dari yang hadir dalam pertemuan itu terkadang memasukkan

apa beda menjual harga diri dengan menjual diri? Meski menjual diri, seorang PSK

Garis bawah!

